

BAB V

KESIMPULAN

Uni Eropa kini sedang dilanda krisis pengungsi. Krisis pengungsi di Eropa bermula pada tahun 2014, berawal dari adanya peningkatan jumlah pengungsi yang ingin mencari perlindungan di negara-negara Eropa melalui Laut Mediterania maupun melalui wilayah Turki. Kebanyakan pengungsi datang dari negara-negara dengan kondisi perpolitikan yang tidak stabil dan sedang dilanda perang. Berdasarkan data yang dipublikasikan oleh Eurostat, jumlah permintaan suaka yang diterima Uni Eropa mengalami peningkatan sebesar 44% pada awal tahun 2015 dengan mayoritas permintaan suaka berasal dari pengungsi Suriah.

Konflik politik di Timur Tengah menjadi faktor utama terjadinya krisis pengungsi di Uni Eropa. Ketidakstabilan kondisi politik di beberapa kawasan, khususnya pemberontakan di negara-negara Arab sejak tahun 2011 yang menyebabkan konflik berkepanjangan. Jutaan orang berusaha melarikan diri dari konflik yang terjadi di negaranya. Perang Suriah menjadi kontributor terbesar gelombang pengungsi di Eropa.

Sebagian besar warga negara Suriah yang melarikan diri dari konflik politik berakhir di kamp-kamp pengungsian di negara tetangga Suriah seperti Libanon, Yordania dan Turki. Akan tetapi, kondisi domestik negara-negara tetangga Suriah itu pun kurang stabil. Nasib para pengungsi yang ada di kamp-kamp tersebut menjadi tidak pasti sehingga banyak pengungsi yang memutuskan

untuk melanjutkan perjalanan ke Eropa demi mendapatkan kehidupan yang lebih baik.

Fenomena migrasi dari negara lain menuju Jerman maupun migrasi dari Jerman menuju negara lain bukanlah sebuah fenomena yang baru. Migrasi di Jerman memiliki sejarah yang panjang. Mengingat sejarah migrasi dan pengungsi di negaranya, Jerman memiliki beberapa aturan terkait migrasi dan pengungsi diantaranya *The Basic Law for the Federal Republic of Germany*, *Asylum Procedure Act*, dan yang paling kontroversial adalah *Open Door Policy*.

Di tengah kecaman negara-negara anggota Uni Eropa atas kebijakan pintu terbukanya, Jerman justru memilih untuk tetap berpegang teguh pada kebijakan tersebut. Hal ini disebabkan oleh adanya aspek normatif di Jerman, seperti pentingnya nilai-nilai sejarah dan identitas yang mampu mempengaruhi tindakan negara tersebut. Jerman menunjukkan tanggapan yang positif dan memberikan bantuan bagi para pengungsi sebagai bentuk dari rasa solidaritas dan rasa bersalah pasca Perang Dunia ke II. Sejarah Republik Federal Jerman pada masa Perang Dunia ke II menunjukkan bahwa Jerman memiliki tanggung jawab khusus terhadap pengungsi. Nilai-nilai solidaritas dan rasa bersalah bersama di masyarakat Jerman menyebabkan Jerman memilih untuk menerapkan kebijakan pintu terbuka dalam mengatasi krisis pengungsi di Eropa.